



PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1 Februari 2016

HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI VII

A. Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran dan Efisiensi Anggaran

Masing-masing Satker harus melakukan :

- Penelaahan dan penyederhanaan nomenklatur anggaran 2016 sesuai dengan framework penyederhanaan nomenklatur anggaran (Gambar 1).
- Penghematan terhadap perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering sebesar 15 % dari masing-masing sumber dana.
- Penghematan terhadap honor output kegiatan yang terkait dengan tuisi dan honorarium jasa profesi sebesar 15 % dari masing-masing sumber dana.
- Menambah sasaran output prioritas pada masing-masing satker dari hasil penghematan.
- Khusus PTN melakukan revisi realokasi dana masyarakat/PNBP untuk pelaksanaan penelitian sebesar minimum 25% untuk PTN BH, 15% untuk PTN BLU dan 10% untuk satker biasa.
- Untuk PTN baru dikecualikan dari target tersebut, dan diminta untuk menyampaikan usulan kenaikan anggaran penelitian sesuai dengan keadaan masing-masing.
- Kementerian diminta untuk mengelola pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk pelaksanaan efisiensi anggaran.
- Untuk anggaran tahun 2017 perlu segera menetapkan target dan anggaran rencana prioritas nasional dan prioritas kementerian.

HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI VII

B. Reformasi Birokrasi

Masing-masing PTN dan Kopertis

- Membuat dokumentasi rencana aksi RB sesuai dengan delapan area perubahan (organisasi, tata laksana, mental aparatur, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik) dan perkembangan capaiannya, dengan kerangka seperti pada matrik dan gambar 2 terlampir.
- Kementerian akan menetapkan PTN yang akan menjadi model lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, dan WBK/WBBM, serta penerapan *resource sharing* untuk memanfaatkan sumberdaya (asset) yang ada di PTN.
- Pembentukan unit layanan terpadu.

Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (1)



Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Organisasi

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Tatalaksana

Berbagi sumber daya Berbasis Efisiensi

Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel

Mental Aparatur

Peraturan Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Pelayanan Publik

Sumber daya manusia aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi

Akuntabilitas

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN



Perkembangan RB di PTN



Manajemen Perubahan

Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Budaya Kerja						
Integritas						
Agen Perubahan						
Revolusi Mental						
Sistem Informasi						

Perkembangan RB di PTN



Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
WBK/WBBM						
Pengendali Gratifikasi						
Wistleblowing System						
SPIP						
Pengaduan						

Perkembangan RB di PTN



Akuntabilitas

Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Rencana Kerja Tahunan						
Sistem Akuntabilitas						
Rencana Strategis						
Sistem Informasi Perencanaan						
Laporan Akuntabilitas						

Perkembangan RB di PTN



Kelembagaan

Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Penyesuaian Organisasi						
Penguatan Organisasi						
Pedoman Evaluasi						
Sistem Informasi Kelembagaan						

Perkembangan RB di PTN



Tata Laksana

Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Peta Bisnis Proses						
SOP makro dan mikro						
Integrasi Layanan						
E-government						
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik						

Perkembangan RB di PTN



SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Assessment Center						
Penilaian Kinerja Pegawai						
Sistem informasi ASN						
Sistem Perencanaan Kebutuhan						
Pola Karier ASN						

Perkembangan RB di PTN



Perundangan

Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Pemetaan						
Penyusunan						
Pengendalian						
Pendokumentasian						

Perkembangan RB di PTN



Pelayanan Publik

Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan

Area Perubahan	Perkembangan di PTN			Tindak Lanjut	Sasaran	Yg dilakukan Kemenristekdikti
	Telah	Proses	Belum			
Standar Pelayanan						
Unit Layanan Terpadu						
Media Pengaduan						
Kepuasan Masyarakat						
Pemanfaatan Teknologi Informasi						

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN
TINGGI

